BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Kajian tentang konflik sosial

a. Pengertian

Ada dua pengertian konflik sosial, pertama sebagai posisi suatu individu atau kelompok dalam masyarakat dan kepentingan yang ingin dicapainya, atau bisa diartikan bahwa setiap individu atau kelompok yang mempunyai kedudukan atau posisi, dimana posisi tersebut mempunyai otoritas dan kepentingan yang digunakan sebagai alat untuk mencapai kepentingan individu atau kelompok tersebut tanpa memperdulikan kepentingan individu atau kelompok lain, maka konflik sosial akan terjadi. Dalam teori Dahrendorf dapat diungkapkan sebagai berikut

> Dalam asosiasi yang terkordinasi secara imperatif keberadaan dua kelompok yang disatukan oleh kepentingan laten secara umum mereka disendirikan. Selanjutnya orientasi kepentingan mereka dapat ditentukan oleh apakah mereka memiliki otoritas atau tidak. Dari kelompok – kelompok semu inilah, maka kelompok – kelompok kepentingan dapat dimasukkan, yakni akan terjadi artikulasi program yang akan dipertahankan atau akan menyerang terhadap legitimasi struktur otoritas yang ada. Dalam suatu asosiasi yang ada, dua kelompok semacam itu selalu berada dalam keadaan konflik.[27]

Dari kutipan tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam kehidupan masyarakat terdapat dua kelompok yang memiliki kepentingan

[27] Irving M Zeitlin, *Memahami kembali sosiologi, kritik terhadap Teori sosiologi Kontemporer.* (Yogyakarta: gadjah Mada University Press, 1998).hal 178-179

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berbeda-beda namun tersembunyi. Dan selanjutnya keberhasilan kelompok tersebut untuk mencapai tujuannya ditentukan dari otoritas yang dimiliki kedua kelompok ini. Dari otoritas yang dimiliki mereka, mereka bisa menentukan tindakan yang akan mereka lakukan. Dari mulai mempertahankan tujuan yang ingin dicapainya, sampai dengan menyerang legitimasi kelompok lain agar menjadi searah dengan tujuan atau program kelompok tersebut.

Sedangkan pengertian yang kedua, konflik sosial sebagai perjuangan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat yang diekspresikan dengan tindakan-tindakan tertentu.[28]

Konflik sosial sebagai pertentangan antara individu atau kelompok yang satu dengan individu atau kelompok yang lain karena berjuang untuk mengejar tujuan-tujuan atau kepentingan yang bertentangan, baik dalam nilai atau memperebutkan status, kekuasaan (otoritas), atau sumber daya alam yang sifatnya terbatas yang ditandai dengan proses saling menyalahkan bahkan saling mencederai.

Konflik sosial yang terjadi antara Perhutani dengan masyarakat Desa Ngumupul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk merupakan pertentangan antara Perhutani dengan masyarakat sekitar hutan di Desa Bagor yang mempunyai kepentingan yang

[28] Anthony Giddens, Problematika Utama Dalam Teori Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 249.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

bertentangan dalam pemanfaatan hutan. Perhutani menginginkan hutan di Desa Bagor ini menjadi lahan reservasi dan hutan produksi sebagai pemasukan penghasilan bagi Perhutani. Sedangkan masyarakat mempunyai kepentingan untuk memanfaatkan hutan dengan gratis dan tanpa batasan.

Selain itu, konflik sosial juga diidentikkan dengan munculnya kelompok pejuang, yaitu suatu kelompok yang mempunyai kepentingan laten yang sama dan saling bercakap-cakap dan mebuat kelompok ini semakin kuat untuk mempertahankan kepentingannya tersebut. Setelah merasa yakin dengan pendirian akan kepentingannya tersebut, mereka akan mengembangkan aspirasi baru yang mengarah kepada konflik dengan individu atau kelompok lain yang mempunyai kepentingan yang bertentangan.[29]

Yang dimaksud dengan kelompok pejuang di sini adalah Perhutani dan masyarakat. Masing-masing dari kelompok ini akan melakukan usaha apapun untuk mencapai kepentingannya. Perhutani mengeluarkan kebijakan agar masyarakat tidak mengambil kayu di hutan. Sedangkan masyarakat melakukan berbagai upaya agar kepentingannya tercapai, termasuk melanggar peraturan Perhutani.

---

[29] Dean G. Pruitt & Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik sosial,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)Hal 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan pengertian lain, masyarakat terdiri dari beberapa kelompok yang mempunyai kepentingan yang saling bertentangan. Kelompok tersebut menggambarkan adanya usaha untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dari kelompok yang lain dan menentukan tindakan-tindakan yang spesifik tersebut akan mendapatkan keuntungan walaupun hal tersebut dapat merugikan kelompok lain.

b. Faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya konflik

Banyak sekali faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya konflik. Menurut Daniel Webster, beberapa hal yang menyebabkan antara lain sebagai berikut:

1) Adanya persaingan antara pihak – pihak yang tidak cocok satu sama lain.
2) Keadaan atau perilaku yang bertentangan, baik itu pertentangan pendapat, kepentingan maupun pertentangan antar individu.
3) Perselisihan akibat kebutuhan, dorongan, atau tuntutan yang bertentangan.
4) Perseteruan.[30]

Namun ada faktor-faktor lain yang mendasar yang menyebabkan terjadinya konflik adalah sebagai berikut:

1) Adanya kepentingan

Setiap individu pada dasarnya mempunyai kepentingan berbeda- beda yang ingin dicapainya. Usaha apapun akan

[30] Peg Pickering, *How To Manage Conflict* (Jakarta: Erlangga, 2001) hal. 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan supaya kepentingan tersebut dapat terwujud dan terpenuhi. Pandangan Marx yang agak ekstrim mengenai determinasi sosial atas tingkah laku individu dirancang untuk melawan pengandaian dari para ahli ekonomi klasik bahwa manusia pada hakikatnya mengejar kepentingannya sendiri. Ia tidak mau menerima bahwa konflik sosial adalah akibat sifat kompetitif, agresif dan keegoisan yang bersifat intrinsik dari manusia.[31] Di antara manusia terjadi konflik karena adanya kepentingan masing-masing yang berbeda. Ia akan menentukan tindakan mana yang menurutnya bisa mewujudkan kepentingannya tersebut. Bahkan ia tidak berpikir apakah tindakan tersebut akan merugikan manusia yang lain atau tidak.

2) Adanya otoritas atau kekuasaan

Pada dasarnya karakter yang melekat pada manusia adalah egois dan ingin berkuasa. Dengan kata lain, pencaharian manusia terhadap otoritas sangat besar. Di sisi lain, jumlah otoritas sendiri tidak sebanding dengan jumlah manusia yang menginginkan otoritas tersebut. Sehingga terjadi persaingan yang cukup ketat untuk mendapatkan otoritas. Persaingan tersebut dapat menimbulkan perpecahan atau konflik antar individu atau kelompok.

---

[31] Tom Campbel, *Tujuh Teori Sosial Sketsa Penilaian Perbandingan,* (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hal. 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain karena jumlahnya yang minim otoritas diperebutkan juga karena apabila seorang individu atau sebuah kelompok mempunyai otoritas maka ototritas tersebut bisa digunakan untuk mengatur individu atau kelompok yang ada di bawahnya. Menurut konsep yang diambil dari Pareto, Mosca, dan Raymon Aron di dalam Zeitlin, konflik lebih disebabkan oleh perbedaan - perbedaan otoritas manusia sendiri dari pada oleh penindasan, eksploitasi, penyalahgunaan otoritas dan isu - isu lainnya. [32] Hal ini dikarenakan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya mempunyai tingkat otoritas yang berbeda-beda. Kelompok atau individu yang mempunyai otoritas dengan tingkat otoritas yang lebih tinggi disebut kelompok superordinat sedangkan kelompok yang diatur yang tingkat otoritasnya lebih kecil disebut kelompok subordinat. Kelompok superordinat mempunyai hak untuk mengatur kelompok yang ada di bawahnya (subordinat). Konflik antara mereka yang berada pada posisi superordinat dengan mereka yang subordinat dapat saja terjadi, terutama apabila terjadi perselisihan bukan kekecewaan dari pihak subordinat kepada pihak subordinat kepada pihak superordinat.

Namun kembali lagi, bahwasanya kebutuhan manusia senantiasa dapat berubah dari waktu ke waktu dan dapat bersatu

---

[32] Irving M Zeitlin, *Memahami kembali sosiologi, kritik terhadap Teori sosiologi Kontemporer* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hal. 179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan kebutuhan yang lainnya. Maka dari itu, jika terjadi konflik antara individu/ kelompok yang satu dengan individu/ kelompok yang lain merupakan suatu hal yang wajar yang dapat menambah pengalaman seseorang dalam meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan oleh konflik tersebut.[33]

c. Bentuk – bentuk konflik

Berdasarkan cara pengekspresiannya, bentuk konflik sosial ada dua yaitu konflik sosial laten dan manifes. Bentuk laten adalah bentuk konflik sosial yang tidak terlihat dan tidak mencuat, karena individu-individu ini tidak berani atau tidak mempunyai kekuatan otoritas untuk protes atau mengungkapkan argumennya, misalnya konflik yang terjadi pada partai Golkar yang sejak berdiri tidak memiliki aturan yang jelas mengenai mekanisme penetapan capres.

Sedangkan konflik sosial manifes adalah konflik sosial yang terlihat dan mencuat ke permukaan. Terdapat dua bentuk dari konflik manifes, yaitu bentuk verbal seperti adu mulut dan percekcokan. Dan konflik sosial bentuk fisik seperti saling memukul, bergelut, atau dengan senjata. Misalkan kasus trisakti dan kasus Mesuji di mana terjadi bentrok dan adu fisik antara pihak-pihak yang berkonflik

Sedangkan berdasarkan taktik kerasnya (ekskalasi), ada tiga bentuk konflik yaitu, bentuk spiral konflik, bentuk agresor-

[33] Robby I. Candra, *Konflik Dalam Hidup Sehari-hari*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992)hal 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

defender (bentuk penyerang-bertahan) dan bentuk perubahan struktural.[34] Ketiga bentuk konflik sosial di atas akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Bentuk *Agresor-Defender*

Suatu bentuk konflik sosial di mana terdapat dua pihak yang disebut *Agresor* dan *Defender*. *Agresor* (penyerang) adalah pihak yang dianggap memiliki suatu tujuan dan ia melakukan usaha apapun untuk meraih tujuannya tersebut sehingga mengakibatkannya terlibat konflik dengan pihak *Defender* (pihak yang bertahan). Dengan kata lain, *Agresor* adalah pihak yang melihat adanya kesempatan untuk mengubah hal-hal yang semula mempunyai kepentingan yang bertentangan dengannya menjadi searah dengan kepentingannya, sedangkan *Defender* adalah pihak yang berusaha menolak perubahan tersebut. Biasanya pihak *Agresor* mulai menyerang dengan menggunakan taktik yang ringan. Apabila taktik tersebut tidak berhasil, maka pihak *Agresor* berpindah kepada taktik yang lebih berat.

2) Bentuk *Spiral Conflict*

Ada dua kelompok besar dalam bentuk *Spiral Conflict*, di dalam konflik ini bersifat balas membalas, masing-masing

[34] Dean G. Pruitt & Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik sosial,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 200

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak menjatuhkan sanksi kepada pihak yang lain atas tindakan-tindakannya yang dianggap tidak menyenangkan. Sedangkan di dalam spiral defensif, masing-masing pihak memberikan respon dalam rangka melindungi diri dari ancaman yang dirasakannya ada di dalam tindakan defensif pihak lain.

3) Bentuk perubahan struktural

Pada bentuk perubahan struktural ini menjelaskan bahwa konflik beserta taktik yang digunakan untuk mengatasinya menghasilkan dampak atau akibat. Dampak ini berupa perubahan-perubahan yang terjadi baik pada pihak-pihak yang berkonflik maupun pada masyarakat di mana mereka tinggal. dampak ini kemudian mendorong perilaku lanjutan yang tingkatannya setara atau lebih tinggi dan mengurangi usaha untuk mencari penyelesaian konflik.

d. Dampak yang terjadi akibat adanya konflik

Jika terjadi konflik antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, maka akan menimbulkan dampak negatif yang dihadapi oleh kedua kelompok tersebut. Dampak tersebut adalah kepercayaan merosot, pembentukan kubu-kubu atau kelompok, produktivitas menurun, timbul masalah moral dan informasi dirahasiakan yang menyebabkan arus komunikasi berkurang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun ada kalanya konflik berdampak pada perubahan struktur sosial tergantung pada tipe struktur itu sendiri. Dalam struktur yang longgar dan terbuka, konflik berdampak pada penyelesaian ketegangan antara dua pihak yang mengalami konflik sosial. Dengan kata lain konflik sosial menimbulkan stabilitas struktural.

Sedangkan dalam struktural yang ketat dan kelompok-kelompok yang amat tertutup, konflik sosial menimbulkan dampak yang beragam. Makin tertutup sebuah kelompok, maka semakin besar dampak negatif yang ditimbulkan karena kelompok yang tertutup cenderung mempunyai otoritas untuk menguasai kebebasan anggotanya. Anggotanya dipaksa untuk menuruti segala peraturan dan memata-matai kelompok lain. Hal ini menimbulkan rasa benci yang sangat besar antara kelompok yang satu terhadap kelompok yang lain. Dalam struktur semacam ini masyarakat terpecah menjadi dua di mana kelas-kelas sosial atau kelompok-kelompok sosial yang saling membenci bahkan terjadi peperangan di antara keduanya. [35]

2. Kajian Tentang Sumberdaya Hutan

Sumberdaya hutan sangat penting artinya bagi kehidupan masyarakat sekitar hutan, bahkan sangat penting bagi kelangsungan ekstensi mereka. Wilayah hutan adalah sarana bagi keberlangsungan

[35]Dr. Abdullah Khozin affandi, *Memahami Teori Konflik,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)hal 35-36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hidup maupun budaya masyarakat sekitar hutan, bukan saja bagi kehidupan sosial, budaya, spritual, ekonomi dan politik mereka melainkan juga bagi ekstensi mereka.

Sumberdaya hutan adalah berbagai macam kekayaan hutan yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk sekitar hutan yang secara langsung memanfaatkan kekayaan hutan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.[36]

Sumberdaya hutan jumlahnya sangat melimpah, terdiri dari hewan dan tumbuhan. Terdapat beragam jenis tumbuhan, yaitu yang dilindungi karena keberadaannya semakin sedikit dan harga jualnya tinggi seperti pohon jati, mahoni dan jenis tumbuhan liar seperti, kunyit, jahe, lengkuas, sono, dan juar yang boleh dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar.

Jenis hutan yang mendominasi di Desa Ngumpul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk adalah Hujan Tropis. Hutan hujan tropis adalah hutan yang didominasi oleh beraneka jenis tumbuhan yang sangat lebat karena mempunyai kandungan humus yang tinggi dan berada di sekitar garis katulistiwa, sehingga curah hujannya sangat tinggi. Hutan ini sangat disukai oleh pembalak hutan liar yang ingin menebangi hutan dan merusak hutan sampai hutan gundul. Akibatnya terjadi tanah longsor dan banjir yang sangat merugikan manusia.

---

[36]Frans VON benda, *Sumber Daya Alam dan Jaminan Sosial* (Yogyakar' Pelajar, 2001) hal. 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut fungsinya, hutan di Desa Ngumpul Kecamatan Bagor ini digolongkan menjadi jenis hutan lindung dan hutan produksi. Hutan lindung adalah adalah hutan yang berfungsi sebagai penjaga ekosistem hutan dan keseimbangan air dalam tanah supaya tidak terjadi erosi, keseimbangan iklim supaya tidak terjadi pencemaran udara seperti CO dan CO_2. Hutan lindung ini dilindungi oleh pemerintah melalui Perhutani dari kejahatan orang – oorang yang menebangi hutan secara membabi buta. Sedangkan hutan produksi adalah hutan yang dapat dikelola oleh pemerintah yang bekerja sama dengan badan swasta seperti Perhutani untuk menghasilkan barang yang bernilai ekonomi karena hutan ini didominasi oleh tanaman-tanaman yang mempunyai nilai jual yang tinggi seperti jati, mahoni dan lain-lain. Sehingga pemerintah melarang masyarakat untuk menebang pohon yang ada di hutan ini. Bahkan masyarakat yang ada di sekitar hutan tersebut hanya diperbolehkan mengambil tanaman liar saja. apabila ada masyarakat yang melanggar peraturan tersebut akan diberikan sanksi yang beratdan dijebloskan ke penjara.[37]

Begitu besar manfaat sumberdaya hutan bagi kelangsungan hidup manusia. Ulah manusia dalam memanfaatkan sumberdaya hutan tidak memperhatikan keseimbangan alam dan mengeksploitasi secara besar-besaran dapat menimbulkan bencana alam. Maka dari itu, menjaga kelestariannya merupakan hal yang sangat penting dan harus

[37] Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996) ,hal. 281-282.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan supaya hutan dapat dimanfaatkan untuk di masa yang akan datang.

3. Kajian Tentang Konflik Sosial Kehutanan

Seperti yang kita ketahui, di Indonesia ini sering sekali terjadi konflik dalam pengelolaan hutan. Hal ini disebabkan oleh masing-masing pihak saling memperebutkan kekayaan alam yang ada di hutan. Konflik ini biasanya terjadi antara masyarakat sekitar hutan atau masyarakat adat dengan instansi pemerintahan yang berhubungan dengan hutan. Masyarakat sekitar hutan sangat menggantungkan kehidupannya pada keberadaan hutan. Semua aktivitasnya sehari-hari dan pemenuhan kebutuhan hidupnya berasal dari hutan. Contoh kasus konflik kehutanan antara lain:

a. Konflik antara masyarakat Battang Barat, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan dengan pemerintah daerah, ketika wilayah yang telah didiaminya itu ditetapkan sebagai hutan lindung, masyarakat dijebloskan ke penjara. Padahal secara historis mereka menempati hutan lindung jauh sebelum kawasan itu ditetapkan sebagai hutan lindung. Penyebab konflik-konflik tersebut adalah tumpang tindihnya kebijakan dan tidak adanya pelibatan masyarakat di dalam pembuatan kebijakan itu. Salah satunya adalah tumpang tindihnya kebijakan perijinan pamanfaatan lahan.[38]

[38]Yunanto wiji Utomo, "Perhutani, Biang Utama Konflik Kehutanan", *Kompas* (Jum'at 18 November, 2011), hal 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kasus Desentralisasi kehutanan mengenai studi kasus tarik menarik kepentingan antara stakeholders dalam pengelolaan kawasan Tahura (Taman Hutan Raya) R. Soerjo yang terletak di Desa Tulung Rejo, Kecamatan Batu, Kabupaten Malang. Dalam kasus ini, proses tarik menarik antara pemerintah propinsi, pemerintah pusat, pengusaha dan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan Tahura R. Soerjo. Pemerintah propinsi Jawa Timur mengeluarkan kebijakan untuk menggunakan kawasan Tahura R. Soerjo ini sebagai hutan konservasi dan sebagai sumber pemasukan PAD propinsi. Namun hal tersebut bertentangan dengan keinginan masyarakat yang tetap memanfaatkan kawasan ini sebagaimana sebelumnya dengan gratis. Faktor-faktor politik atau ekonomis yang menyebabkan terjadinya tarik menarik kepentingan ini adalah adanya perbedaan kepentingan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan propinsi Jawa Timur, antara pemerintahan propinsi dengan stakeholders lainnya, maupun akibat perubahan status pengelolaan hutan Tahura R. Soerjo. Sedangkan pemerintah pusat enggan melepas kewenangan pengelolaan hutan secara penuh kepada daerah. Dari permasalahan kepentingan ekonomi ini muncul kebijakan-kebijakan yang merupakan produk politik, sehingga memicu timbulnya tarik menarik kepentingan.

c. Kasus hak ulayat(hak bersama para anggota masyarakat hukum adat atas tanah) di dalam kawasan hutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keberadaan hak ulayat di dalam kawasan hutan diakui oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria, dan undang-undang Kehutanan No. 41 tahun 1999. Akan tetapi sengketa hak ulayat yang berada di kawasan hutan masih terjadi. Banyak pemanfaatan hutan yang dilakukan dengan sengaja tidak menggunakan ijin dari masyarakat yang mengelola hutan adat atau hutan ulayat ini. Padahal hak ulayat ada pada masyarakat adat setempat. Keberadaan masyarakat adat diakui oleh konstitusi, tetapi hak-hak atas tanah-tanah mereka kadang diakui kadang dilanggar dan kadang diombang ambingkan. Tidak adanya kepastian hukum yang mengatur tentang penyelesaian sengketa hak ulayat di kawasan hutan, seperti pada UUPA(Undang-Undang Pokok Agraria), menyebabkan sengketa hak ulayat dilakukan dengan dua cara yaitu musyawarah untuk mufakat dan pengadilan di mana penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan apabila adanya koordinasi antara dinas terkait, pemerintah, pemuka adat dan investor.

Begitu banyaknya kasus kehutanan di Indonesia, membuat masyarakat di sekitar hutan menjadi pihak yang harus selalu mengalah dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pihak lain termasuk pemerintah. Hal ini terjadi dikarenakan pihak lain tersebut mempunyai otoritas yang lebih kuat untuk mencapai kepentingannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Kerangka Teoritik

Konflik yang terjadi antara Perhutani dengan masyarakat ini adalah konflik mengenai pengelolahan sumberdaya hutan. Dalam karya Dahrendorf di dalam Ritzer dan teoritisi konflik lainnya menyatakan bahwa setiap masyarakat setiap saat tunduk pada proses perubahan dalam sistem sosial dan melihat berbagai elemen kemasyarakatan menyumbang terhadap disentegrasi dan perubahan. Teoritisi konflik melihat, apapun keteraturan yang terdapat dalam masyarakat berasal dari pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang berada di atas. Teori konflik menekankan pada peran kekuasaaan dan mempertahankan ketertiban dalam masyarakat. Masyarakat disatukan oleh kebebasan yang dipaksakan.[39] Dengan demikian, posisi tertentu dalam masyarakat mendelegasikan kekuasaan dan otoritas terhadap posisi yang lain. Fakta kehidupan sosial ini mengarahkan Dahrendorf pada tesis sentralnya bahwa perbedaan distribusi otoritas selalu menjadi faktor yang menentukan konflik sosial menjadi sistematis.

Salah satu tesis Dahrendorf adalah mengenai otoritas. Menurutnya berbagai posisi dalam masyarakat memiliki tingkat otoritas yang berlainan. Otoritas tidak terdapat pada diri individu, namun pada posisi. Dahrendorf tidak hanya tertarik pada struktur posisi ini, namun juga konflik pada mereka. Otoritas yang melekat pada posisi adalah elemen kunci dalam analisis Dahrendorf. Otoritas selalu berarti subordinasi dan

[39] George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hal. 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

superordinasi, mereka yang menduduki posisi otoritas tersebut diharapkan akan mengendalikan bawahan. Otoritas bukanlah fenomena sosial yang umum, mereka yang tunduk pada kontrol dan mereka yang dibebaskan dari kontrol akan ditentukan dalam masyarakat. Terakhir, karena otoritas adalah absah, maka sanksi dapat dijatuhkan pada pihak yang menentang. [40]

Jadi, pemegang otoritas mendominasi, karena harapan dari individu lain yang mengelilinginya, bukan karena karakteristik psikologisnya. Seseorang yang memegang otoritas pada satu setting tidak berarti menduduki posisi sebagai pemegang otoritas pada setting lain. Ini berasal dari argumen Dahrendorf bahwa masyarakat terdiri dari sejumlah unit yang ia sebut dengan asosiasi yang ditata berdasarkan perintah.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, ketertiban masyarakat di Desa Ngumpul Kecamatan Bagor diakibatkan oleh pemaksaan dari pihak Perhutani melalui kebijakan yang dikeluarkannya. Sehingga masyarakat tidak ada yang berani menentang ketika dilarang untuk mengambil kayu di hutan, karena mereka takut mendapat sanksi yang berat dari pihak Perhutani yang mempunyai otoritas untuk mengatur pendistribusian kekayaan hutan. Individu-individu yang tergabung dalam lembaga Perhutani mempunyai posisi superordinasi karena diberi mandat oleh pemerintah pusat yang posisinya lebih tinggi dari pada Perhutani untuk mengendalikan masyarakat (subordinat) dalam pemanfaatan sumberdaya hutan. Jadi tatanan-tatanan yang ada di masyarakat dan sumberdaya hutan

---

40 George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003),hal. 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tumbuh dari tekanan-tekanan Perhutani yang direalisasikan dalam bentuk aturan-aturan yang berlaku atas perintah pemerintah pusat.

Tekanan pihak perhutani terhadap masyarakat sekitar dalam pemanfaatan sumber daya hutan meningkat dan menimbulkan konflik. Karena ada juga masyarakat yang menolak otoritas Perhutani dikarenakan kebutuhan ekonomi yang sangat mendesak dan dibarengi dengan Sumberdaya manusia yang rendah. Sedangkan sumberdaya hutan adalah produksi bagi pasar dan juga sarana untuk memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidup masyarakat Desa Ngumpul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk. Nilai politis dan ekonomis dari pemegang hak milik pengelolaan sumberdaya hutan meningkatkan ketegangan dan perseteruan antara pihak Perhutani dengan masyarakat Desa Ngumpul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.

Konflik antara masyarakat Desa Ngumpul dengan agen-agen negara seperti Perhutani sendiri dan perusahaan swasta yang mendapatkan hak dari pemerintah untuk mengeksploitasi kekayaan hutan akan tetap berlangsung selama otoritas yang dipegang oleh Perhutani masih berlaku, dan masih terdapat perbedaan kepentingan antara Perhutani dengan masyarakat.

Selain itu konflik sosial juga disebabkan oleh sebagian masyarakat sekitar hutan Desa Bagor mengabaikan otoritas yang dimiliki oleh Perhutani. misalkan masyarakat yang tetap mengambil kayu di hutan meskipun sudah ada aturan yang tegas dalam kebijakan yang ditetapkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh Perhutani. masyarakat tipe seperti ini mencoba untuk menyerang legitimasi struktur otoritas yang sudah ada, yaitu Perhutani berada di tingkat superordinat dan masyarakat berada di tingkatan subordinat.

Meskipun konflik yang terjadi bisa bersifat laten dalam arti tidak mencuat ke permukaan, tapi apabila konflik tidak segera diselesaikan atau diminimalisir maka konflik tersebut menimbulkan dampak yang tidak baik bagi Perhutani dengan masyarakat Desa Ngumpul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.

C. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian ini.

Penelitian pertama adalah penelitian-penelitian yang mengangkat masalah sumberdaya hutan yang dirangkum dalam buku yang berjudul" Sumber daya Alam dan Jaminan Sosial" karangan Frans Von Benda terbit pada tahun 2001. Dari penelitian tersebut, yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Bruno Locatelli mengenai adaptasi hutan dan manusia terhadap perubahan iklim. Penelitian ini mengungkapkan masalah adaptasi untuk hutan (pengurangan dampak perubahan iklim terhadap hutan dan ekosistemnya) dan hutan untuk adaptasi (pemanfaatan hutan untuk membantu penduduk setempat dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat secara umum beradaptasi terhadap perubahan yang akan terjadi).[41]

Berbeda dengan penelitian Locatelli, penelitian saya melihat tentang konflik sosial antara Perhutani dengan masyarakat khususnya dalam pemanfaatan sumberdaya hutan.

Penelitian lain yang relevan adalah penelitian mengenai Konflik masyarakat dengan Pemerintah daerah, yaitu Konflik antara Pemerintah Kota Surabaya dengan pedagang kaki lima di pasar Keputran Surabaya, yang dilaksanakan oleh Aditya pada tahun 2010. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu : 1) bagaimana dinamika konflik antara Pemerintah Kota Surabaya dengan pedagang kaki lima di Pasar Keputran Surabaya? 2) Bagaimana resolusi konflik yang muncul dari konflik antara Pemerintah Kota surabaya dengan pedagang kaki lima di Pasar Keputran Surabaya? Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun persamaannya yaitu sama – sama melakukan penelitian terhadap konflik yang terjadi antara masyarakat biasa dengan pemerintah daerah akibat suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tersebut . Namun perbedaannya, pada penelitian terdahulu objek penelitiannya adalah Pemerintah Kota Surabaya dan pedagang kaki lima Pasar Keputran surabaya. Sedangkan pada penelitian sekarang objek penelitiannya adalah Perhutani (Perusahaan Hutan Negara Indonesia) dan masyarakat Desa Ngumpul

[41] BrunoLocatelli: *Adaptasi Htuan dan Manusia Terhadap Perubahan Iklim,* http://www.cifor.org/publications/pdf_files/media/MediaGuide_REDD_Indonesian. Adaptasi Hutan dan Manusia Terhadap Perubahan Iklim pdf., diakses tanggal 26 april 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk. Sehingga penelitian yang peneliti lakukan sekarang ini merupakan penelitian yang berbeda dengan penelitian yang sebelumnya.

Penelitian lain yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Yunita Wulansari KD, SP dengan Judul Desentralisasi kehutanan: studi kasus tarik menarik kepentingan antara stakeholders dalam pengelolaan kawasan Tahura R. Soerjo yang dilaksanakan pada tahun 2010. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya proses tarik menarik antara stakeholders yaitu pemerintah propinsi, pemerintah pusat, pengusaha dan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan Tahura R. Soerjo. Pemerintah propinsi Jawa Timur mengeluarkan kebijakan untuk menggunakan kawasan Tahura R. Soerjo ini sebagai hutan konservasi sebagai sumber pemasukan PAD propinsi. Namun hal tersebut bertentangan dengan keinginan masyarakat yang ingin memanfaatkan kawasan ini sebagaimana sebelumnya dengan gratis. Faktor-faktor politik yang menyebabkan terjadinya tarik menarik kepentingan ini adalah adanya perbedaan kepentingan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan propinsi Jawa Timur, antara pemerintahan propinsi dengan stakeholders lainnya, maupun akibat dari perubahan status dan pengelolaan hutan Tahura R. Soerjo. Sedangkan faktor ekonomi membuat pemerintah pusat enggan melepas kewenangan pengelolaan hutan secara penuh kepada pemerintah daerah. Dari permasalahan ekonomi ini muncullah kebijakan-kebijakan yang merupakan produk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politik dan menjadi pemicu timbulnya tarik menarik kepentingan. Mekanisme penyelesaian tarik menarik kepentingan di antara stakeholders ini adalah dengan desentralisasi kehutanan kemudian menjadikan konflik itu sebagai sumber dari perubahan dalam sistem sosial. Masyarakat diberi peran lebih dalam penentuan kebijakan oleh pemerintah. Persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama mengangkat tema konflik sosial antara pemerintah dengan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Namun perbedaannya terletak pada objek penelitian dan lokasi penelitiannya. Penelitian ini mengambil lokasi di hutan Tahura R. Soerjo, sedangkan penelitian bertemakan konflik sosial antara Perhutani dengan masyarakat di Desa Ngumpul mengambil lokasi di hutan dekat Desa Ngumpul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.

Penelitian berikutnya yang relevan dengan tema penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Wijoseno, S.H yang berjudul Eksistensi hak ulayat(hak bersama para anggota masyarakat hukum adat atas tanah) di dalam kawasan hutan yang dilakukan pada tahun 2009. Kesimpulan dari penelitian ini adalah keberadaan hak ulayat di dalam kawasan hutan diakui oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria sepanjang eksistensinya masih ada dan dalam undang-undang Kehutanan No. 41 tahun 1999 yang menjelaskan tentang penyelesaian sengketa hak ulayat yang berada di kawasan hutan meskipun tidak secara detail. Banyak pemanfaatan hutan yang dilakukan dengan sengaja tanpa ijin. Padahal di dalam hutan tersebut terdapat hutan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adat atau hutan ulayat yang merupakan perwujudan dari hak ulayat masyarakat adat setempat. Keberadaan masyarakat adat diakui oleh konstitusi, tetapi hak-hak atas tanah-tanah mereka kadang diakui, kadang dilanggar, dan kadang diombang ambingkan. Dengan tidak adanya kepastian hukum yang jelas yang mengatur tentang penyelesaian sengketa hak ulayat di kawasan hutan seperti pada UUPA(Undang-Undang Pokok Agraria), maka penyelesaian sengketa hak ulayat dilakukan dengan dua cara yaitu musyawarah untuk mufakat dan pengadilan di mana penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan apabila adanya koordinasi antara dinas terkait, pemerintah, pemuka adat dan investor.

Persamaan penelitian Wijoseno dengan penelitian saya adalah sama-sama meneliti tentang konflik sosial dalam pemanfaatan hutan. Namun perbedaannya adalah objek penelitiannya. Dalam penelitian Wijoseno yang berkonflik adalah masyarakat adat dengan pemerintah daerah dan investor. Sedangkan pada penelitian konflik sosial antara Perhutani dengan masyarakat, objek penelitiannya adalah masyarakat Desa Ngumpul dengan Perhutani.

Penelitian lain yang relevan yang kelima adalah penelitian yang dilakukan oleh Bowo Santoso Arbiarto mengenai konflik Kepentingan Dalam Implementasi Kebijakan Penertiban Kawasan Brandgang di Wilayah Surabaya. Rumusan masalah ndalam penelitian ini adalah:1) apa yang melatarbelakangi penertiban Brandgang di wilayah Surabaya tersebut?2) siapa yang diuntungkan dalam penertiban Brandgang di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wilayah Surabaya tersebut? Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian konflik sosial Perhutani dengan masyarakat Desa Ngumpul dalam Pemanfaatan sumberdaya hutan adalah sama-sama meneliti tentang masalah konflik antara masyarakat dengan pemerintah. Namun, perbedaannya adalah jika penelitian ini membahas konflik perebutan wilayah Brandgang antara masyarakat sekitar dengan pemerintah. Sedangkan pada penelitian bertemakan konflik antara Perhutani dengan masyarakat Desa Ngumpul, yang menyebabkan adanya konflik adalah perebutan hak dalam pemanfaatan sumberdaya hutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id